

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

TAHUN 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Taufik dan Hidayah-Nya, maka Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 dapat disusun, dan akan disampaikan kepada Bupati Demak melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dibuat berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 dan pasal 71. Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Kami menyadari, bahwa dalam laporan ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan, namun kami atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan hal tersebut sebagai bahan koreksi dan introspeksi untuk perbaikan kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak di masa-masa yang akan datang.

Demak, Januari 2024
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK



RUDATIN SURYANDARL ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660427 199903 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 288)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Demak;

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah

terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Visi dan Misi Bupati Demak diterjemahkan pada misi pembangunan Kabupaten Demak tahun 2021– 2026 menyatakan:

- a. Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya;
- b. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dari ketiga misi Daerah Kabupaten Demak tersebut maka misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah misi 1 (satu) dan 3 (tiga).

1.3 Data Umum

1. Data Geografis Daerah

Letak geografis Kabupaten Demak berada di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Kabupaten Demak berada pada koordinat 60 43' 26" – 70 09' 43" Lintang Selatan dan 110 27' 58"–110 48' 47" Bujur

Timur.

Kabupaten Demak dengan bentang Barat ke Timur sepanjang 49 km dan bentang Utara ke Selatan sepanjang 41 km, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kota Semarang

Luas wilayah Kabupaten Demak tercatat sebesar 897,43 km² dan secara administratif terbagi menjadi 14 Kecamatan yang terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Demak semester 1 Tahun 2023 sebesar 1.243.380 jiwa terdiri dari 627.201 jiwa laki-laki dan 616.179 jiwa perempuan.

3. Pertumbuhan Penduduk

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan

migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2020–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2020.

Penduduk Kabupaten Demak adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Demak selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi Pemerintahan. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin.

Rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Demak

**3.1 PENDUDUK
POPULATION**

Tabel 3.1.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak, 2021-2022
Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Sex Ratio by Subdistrict in Demak Regency, 2021-2022

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2021 ¹	2022 ¹	2020-2021	2020-2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mranggen	176 603	177 837	0,67	0,69
Karangawen	95 331	96 198	0,96	0,93
Guntur	87 085	88 228	1,49	1,39
Sayung	106 005	106 503	0,37	0,43
Karantengah	69 398	70 154	1,20	1,14
Bonang	107 209	107 915	0,62	0,64
Demak	110 762	111 576	0,72	0,73
Wonosalam	85 562	86 638	1,42	1,33
Dempet	60 244	60 921	1,24	1,17
Kebonagung	41 717	41 955	0,50	0,54
Gajah	52 363	53 101	1,62	1,50
Karanganyar	78 052	78 723	0,89	0,87
Mijen	58 782	59 395	1,13	1,08
Wedung	83 264	84 073	1,04	1,00
Demak	1 212 377	1 223 217	0,93	0,91

4. Jumlah PNS

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Demak sebanyak 7.856 orang. Bila dilihat menurut jenis kelamin maka untuk Aparatur Sipil Negera (ASN) laki-laki sebanyak 2.939 dan perempuan sebanyak 4.917.

Keadaan kepegawaian atau Sumber Daya Manusia yang ada di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Kabupaten Demak dilihat menurut golongan, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sumber Daya Dinputaru

No	Unit/Bidang	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	IX	Jumlah
1	Kepala Dinas				1		1
2	Sekretariat	1	9	4	1		15
3	Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi		6	9		1	16
4	Bina Marga		3	9			12
5	Cipta Karya		4	4	2	2	12
6	Tata Ruang dan Pertanahan		2	6		3	11
7	UPTD	4	63	10			77
Jumlah							144

Tabel 1.2 Keadaan Kepegawaian/Personil Menurut Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II b	
2	Eselon III a	1
3	Eselon III b	3
4	Eselon IV a	4
5	Eselon IV b	1
Jumlah		9

Tabel 1. 3 Keadaan Kepegawaian/Personil Menurut Jenjang Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	6
2	Sarjana	28
3	Sarjana Muda	1
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	85
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	17
6	Sekolah Dasar	7
Jumlah		144

Tabel 1.4 Keadaan Kepegawaian/Personil Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenjang Struktural	Jumlah
1	Spamen	
2	Diklat PIM Tk. III	1
3	Diklat PIM Tk. IV	9
Jumlah		10

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan asli daerah yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak terdiri dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Retribusi jasa umum berupa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, sedangkan retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian alat.

Target pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebesar Rp 55.750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 55.750.000.000,00 (100%).

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, pada tahun anggaran 2023, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 204.192.427.900,00, Anggaran tersebut bersumber dari APBD Propinsi sebesar Rp. 52.750.000.000,00 terdiri dari DAK sebesar Rp. 50.203.045.000,00, APBD Kabupaten sebesar Rp 89.089.382.900,00, DAU SG sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan DID sebesar Rp. 6.150.000.000,00 dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 1.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	14.713.607.000	14.278.377.124
2	Belanja Barang dan Jasa	61.270.615.900	56.292.886.978
3	Belanja Hibah	18.204.000.000	18.204.000.000
4	Belanja Modal	110.004.205.000	109.422.950.000
Jumlah		204.192.427.900	198.198.214.102

7. Realiasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Pada Tahun 2023 tidak mempunyai Jenis Pembiayaan.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan, pengelolaan pendapatan pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan, dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	Nama Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	183.562.371.786	203.909.137.900
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.392.011.286	24.174.308.400
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	150.000.000	150.000.000
	a. <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	37.500.000	37.500.000
	b. <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	60.000.000	60.000.000
	c. <i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	15.000.000	15.000.000
	d. <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	37.500.000	37.500.000
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	19.117.288.886	16.840.311.000
	a. <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	16.876.934.886	14.639.957.000
	b. <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	2.240.354.000	2.200.354.000
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	487.500.000	623.900.000
	a. <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	87.500.000	87.500.000
	b. <i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	400.000.000	536.400.000

No	Nama Program / Kegiatan		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.663.650.000	1.368.650.600
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	30.000.600
	b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	100.000.000
	c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000	150.000.000
	d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	165.000.000	115.000.000
	e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.500.000	11.500.000
	f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	896.150.000	776.150.000
	g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.000.000	36.000.000
	h.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000	150.000.000
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		75.000.000	75.000.000
	a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	35.000.000	35.000.000
	b.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000	40.000.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		201.400.000	2.184.909.000
	a.	Pengadaan Alat Besar	-	1.760.000.000
	b.	Pengadaan Mebel	50.400.000	23.757.600
	c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.000.000	401.151.400
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		804.414.000	847.314.000
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	8.000.000
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	729.414.000	729.414.000
	c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	109.900.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.892.758.400	2.084.223.800

No	Nama Program / Kegiatan		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.000.000	39.950.000
	b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.000.000	690.515.400
	c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	100.000.000	100.000.000
	d.	Pemeliharaan Mebel	55.000.000	55.000.000
	e.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.760.000	171.760.000
	f.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	603.758.400	828.758.400
	g.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	-
	h.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.240.000	198.240.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		21.639.015.500	9.604.750.500
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		21.439.015.500	9.407.750.500
	a.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	200.000.000	200.000.000
	b.	Pembangunan Pintu air/ bendung pengendali banjir	400.000.000	400.000.000
	c.	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	500.000.000	500.000.000
	d.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	400.000.000	3.080.985.000
	e.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	500.000.000	500.000.000
	f.	Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	600.000.000	600.000.000

No	Nama Program / Kegiatan		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan
	g.	<i>Normalisasi/Restorasi Sungai</i>	18.339.015.500	3.589.740.500
	h.	<i>Operasi dan Pemeliharaan Check Dam</i>	200.000.000	160.275.000
	i	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	150.000.000	150.000.000
	j	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	150.000.000	226.750.000
2	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		200.000.000	197.000.000
	a.	<i>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</i>		100.000.000
	b.	<i>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	200.000.000	97.000.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		24.674.894.000	20.862.308.000
1	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>		24.674.894.000	20.862.308.000
	a.	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</i>	500.000.000	500.000.000
	b.	<i>Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	5.300.000.000	4.293.725.000
	c.	<i>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	18.874.894.000	16.068.583.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		19.908.151.000	19.164.471.000
1	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		19.908.151.000	19.164.471.000

No	Nama Program / Kegiatan		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan
	a.	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	500.000.000	500.000.000
	b.	<i>Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</i>	18.808.151.000	18.064.471.000
	c.	<i>Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</i>	100.000.000	100.000.000
	d.	<i>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</i>	500.000.000	500.000.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		600.000.000	1.000.000.000
1	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		600.000.000	1.000.000.000
	a.	<i>Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan</i>	300.000.000	400.000.000
	b.	<i>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase</i>	300.000.000	600.000.000
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		12.498.300.000	12.505.000.000
1	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>		12.498.300.000	12.505.000.000
	a.	<i>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</i>	12.498.300.000	12.305.000.000
	b.	<i>Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</i>		200.000.000
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		100.000.000	150.000.000
1	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>		100.000.000	150.000.000
	a.	<i>Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	100.000.000	150.000.000

No	Nama Program / Kegiatan		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		78.850.000.000	114.998.300.000
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		78.850.000.000	114.998.300.000
	a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	-	364.000.000
	b.	Pembangunan Jalan	19.900.000.000	59.144.640.000
	c.	Pelebaran Jalan Menuju Standar	250.000.000	250.000.000
	d.	Rekonstruksi Jalan	34.500.000.000	34.500.000.000
	e.	Rehabilitasi Jalan	3.000.000.000	3.136.000.000
	f.	Pembangunan Jembatan	4.200.000.000	13.686.830.000
	g.	Penggantian Jembatan	16.000.000.000	3.036.830.000
	h.	Rehabilitasi Jembatan	1.000.000.000	880.000.000
IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		900.000.000	1.450.000.000
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		440.000.000	440.000.000
	a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	340.000.000	340.000.000
	b.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang penataan Ruang	100.000.000	100.000.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		320.000.000	670.000.000
	a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota	320.000.000	670.000.000

No	Nama Program / Kegiatan		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		140.000.000	340.000.000
	a.	<i>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	140.000.000	340.000.000
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		200.000.000	283.290.000
I	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		200.000.000	283.290.000
1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		200.000.000	283.290.000
	a.	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota</i>	200.000.000	283.290.000
	TOTAL ANGGARAN		183.762.371.786	204.192.427.900

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan.

3.1 Urusan Pekerjaan Umum

Latar belakang pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang didasari oleh Landasan hukum pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Demak. Permasalahan utama yang dialami Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah:

1. Belum semua masyarakat terlayani air minum dan sanitasi;
2. Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten yang belum dalam kondisi baik dan memenuhi standar jalan Kabupaten;
3. Masih ditemukan genangan air di wilayah perkotaan saat musim penghujan;
4. Kurangnya ketersediaan air guna pemenuhan kebutuhan air baku dan air irigasi untuk pertanian;
5. Masih banyak tenaga konstruksi yang belum bersertifikat;
6. Tingginya alih fungsi lahan;
7. Beberapa aset tanah milik pemerintah Kabupaten Demak yang belum bersertifikat.

Permasalahan tersebut diatasi melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penatagunaan Tanah.

3.1.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 24.174.308.400,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 21.754.654.416 atau mencapai 89,99%. Program ini memiliki dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja pertama adalah persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dan indikator kinerja kedua adalah persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi

Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan target indikator kinerja pertama adalah persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 100% terealisasi 100% atau mencapai 100%. Target indikator kinerja kedua adalah persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 100% terealisasi 100% atau mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (100%) disebabkan adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, manajemen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah target belum seluruhnya tercapai, capaian kinerja belum seluruhnya meningkat dari tahun sebelumnya, informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah melakukan pemantauan secara berkala atas pengukuran kinerja berdasarkan rencana aksi yang telah dibuat, melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang dibuat, melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi lengkap dengan capaian, hambatan dan rencana perbaikan kinerja serta alternatif perbaikan, meningkatkan kembali efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja. Manfaat Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah agar pelayanan dapat dilaksanakan sesuai standar pelayanan.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Alokasi anggaran Rp 9.604.750.500,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 9.482.548.162,00 atau mencapai 98,73%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan target 75,99% terealisasi 78,38% atau mencapai 103,14%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (103,14%) disebabkan oleh dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, adanya program unggulan yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal.

Namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah faktor rusak air yang mempercepat laju kerusakan jaringan irigasi, daya dukung tanah yang rendah sehingga menyebabkan mudah longsohnya tanggul saluran. Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah dengan melakukan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala, meningkatkan frekuensi pemeliharaan jaringan irigasi serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat/petani yang tergabung dalam P3A untuk menjaga aset irigasi. Manfaat Penyelenggaraan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Alokasi anggaran Rp 20.862.308.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 19.465.658.008 atau mencapai 93,31%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu persentase rumah tangga berakses air minum dengan target 100% terealisasi 87,59% atau mencapai 87,59%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (87,59%) disebabkan oleh dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, komitmen dari Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bidang air minum.

Namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah topografi di wilayah Kabupaten Demak sebagian besar berupa pesisir pantai.

Strategi yang guna mengurangi hambatan dimasa mendatang antara lain mencari alternatif sumber air baku, mengajukan penganggaran baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk mendukung peningkatan akses air minum. Bersama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) melaksanakan pemetaan wilayah layanan, melaksanakan monitoring evaluasi terhadap sistem pengelolaan air minum yang telah terbangun.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah meningkatkan rumah tangga berakses air minum serta mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Alokasi anggaran Rp 19.164.471.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 18.534.484.659,00 atau mencapai 96,71%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu persentase rumah tangga bersanitasi dengan target 100% terealisasi 100% atau mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (100%) disebabkan oleh dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, komitmen dari Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bidang air limbah.

Namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah topografi di wilayah Kabupaten Demak Sebagian besar berupa pesisir pantai. Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah dengan mengajukan penganggaran baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk mendukung peningkatan akses sanitasi, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait dalam upaya peningkatan akses sanitasi dan pencapaian *Open Defecation Free* (ODF) Kabupaten Demak, mengarahkan fokus kegiatan pada peningkatan akses sanitasi dan pencapaian *Open Defecation Free* (ODF) Kabupaten.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah meningkatkan rumah tangga bersanitasi serta mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Alokasi anggaran Rp 1.000.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 688.832.092,00 atau mencapai 68,88%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun dengan target tidak terjadi terealisasi tidak terjadi atau mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (100%) disebabkan oleh dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah, melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase secara berkala.

Namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah faktor geografis Demak Kota berupa daratan dan cekungan sehingga faktor kemiringannya rendah, semakin bertambahnya drainase tertutup di wilayah Demak Kota yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah dengan cara melebarkan dimensi drainase agar dapat berfungsi sebagai penampung sementara sebelum mengalir ke sungai (*main drain*) serta meningkatkan pemeliharaan drainase khususnya pada drainase tertutup.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase adalah mengendalikan kapasitas air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi banjir serta mencegah timbulnya kerusakan pada jalan dan bangunan.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Alokasi anggaran Rp 12.505.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 12.311.400.100,00 atau mencapai 98,45%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu rasio bangunan berizin dengan target 0,0219 terealisasi 0,0219 atau mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (100%) disebabkan oleh Tersedianya dukungan pemerintah dalam hal anggaran untuk kelanjutan pembangunan di kabupaten Demak, penyelenggaraan pengelolaan bangunan gedung yang tertib administrasi.

Namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah keterbatasan anggaran daerah (APBD) untuk penanganan rehabilitasi gedung dan pembangunan gedung, belum tersedianya data lengkap bangunan untuk prioritas pembangunan atau rehabilitasi. Strategi dalam mengatasi permasalahannya adalah memplotkan anggaran prioritas pembangunan dan rehabilitasi dengan membentuk tim analis dan verval, membuat database gedung pemerintahan kabupaten Demak, menjadwalkan pelaksanaan pekerjaan dan target yang harus dipenuhi.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penataan Bangunan Gedung terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan yang tertib, andal, berkualitas, produktif, layak huni dan berjati diri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terjadinya peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Pembangunan, meningkatkan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong keterpaduan pemb. infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah.

7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Alokasi anggaran Rp 150.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 146.100.000,00 atau mencapai 97,40%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dengan target 50,27 % terealisasi 52,27 % atau mencapai 103,97%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (103,97%) disebabkan oleh dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah, melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan Kerjasama dan Koordinasi antara dinas dan pelaku badan usaha untuk meningkatkan program pengembangan jasa konstruksi

Namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil terkendala, masih minimnya staff/ tenaga ahli, data pendukung dan peralatan pada bina konstruksi guna menunjang program pengembangan jasa konstruksi. Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah membentuk tim koordinasi dengan pelaku badan usaha/penyedia jasa, membuat forum diskusi dengan badan usaha untuk koordinasi tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, membuat database tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi (badan usaha, tenaga terampil, tenaga ahli, alat konstruksi, dll)

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengembangan Jasa Konstruksi adalah meningkatkan partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah.

8. Program Penyelenggaraan Jalan

Alokasi anggaran Rp 114.998.300.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 114.131.191.961,00 atau mencapai 99,25%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dengan target 88,06% terealisasi 89,365% atau mencapai 101,48%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (101,48%) disebabkan oleh dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, penggunaan beton sebagai material jalan sehingga umur jalan menjadi lebih tahan lama, dilaksanakannya survei investigasi kondisi jalan yang semakin baik yang mengakibatkan identifikasi jalan rusak lebih mudah.

Namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah beban kendaraan yang melewati kelas jalan melebihi kapasitas (tonase) sehingga mengakibatkan jalan cepat rusak, stabilitas tanah kurang stabil sehingga jalan bergelombang, adanya rob yang menyebabkan jalan berlubang.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah peningkatan penanganan jalan dan jembatan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Jalan adalah meningkatnya perekonomian masyarakat dan meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Alokasi anggaran Rp 1.450.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 1.417.476.806,00 atau mencapai 97,76%. Program ini memiliki indikator kinerja luas alih fungsi lahan dengan target 0,059576709 terealisasi 0,059576709 atau mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (100%) disebabkan adanya regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan, ketersediaan anggaran, adanya sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan instansi lain dan *stakeholder* serta karena adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola ruang dan manfaatnya untuk menjaga ketertiban dan kelancaran secara prasarana.

Namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan penambahan personil juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan mengirim personil untuk mendapatkan pelatihan intensif. Manfaat Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah meningkatnya ketaatan terhadap RTRW.

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 8 (delapan) kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp 150.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 111.648.250,00 atau

mencapai 74,43%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah dengan realisasi 24 dokumen dari target 12 dokumen sehingga capaiannya sebesar 200%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu regulasi, perencanaan serta manajemen yang belum optimal, Upaya mengatasinya dengan Membuat rencana kerja kegiatan.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 4 (dua) sub kegiatan yaitu

- a. penyusunan dokumen perencanaan dengan output 4 (empat) dokumen perencanaan Perangkat Daerah
- b. koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan output 8 dokumen.
- c. koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan output 8 dokumen.
- d. Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan output 15 laporan

2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp 16.840.311.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 15.971.247.502,00 atau mencapai 90,37%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja jumlah laporan keuangan dengan realisasi 1 laporan dari target 1 laporan sehingga capaiannya sebesar 100%.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN output 145 orang/bulan.
- b. Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output 71 dokumen.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp 623.900.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 581.029.000 atau mencapai

93,13%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi dengan realisasi 100% dari target 100 % sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu kurangnya SDM dalam menangani Kepegawaian, upaya untuk mengatasinya dengan melakukan Pendidikan pelatihan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya output 1 Paket.
- b. Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan output 250 Orang.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp 1.368.650.600,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 807.328.500,00 atau mencapai 58,99%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu kurangnya sarana dan prasarana kantor, upaya mengatasinya dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada serta berkoordinasi dengan pimpinan terkait dengan sarana prasarana kantor.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor output 2 Paket.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan

- output 9 paket
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output 17 paket.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output 33 paket
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output 12 dokumen
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output 14 laporan
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan output 9 dokumen
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan output 3 dokumen.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran Rp 2.184.909.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 2.083.980.000 atau mencapai 95,38%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja jumlah BMD yang diadakan dengan realisasi 100 % dari target 100 % sehingga capaiannya sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kurangnya dukungan anggaran, Upaya mengatasinya dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu

- a. Pengadaan Alat Besar dengan output 1 unit
- b. Pengadaan Mebel dengan output 6 unit.
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output 31 unit.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran Rp 847.314.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 461.249.697,00 atau

mencapai 54,44%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja jasa penunjang urusan yang tersedia dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana kantor, upaya mengatasinya dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada serta berkoordinasi dengan pimpinan terkait dengan sarana prasarana kantor.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu

- a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan output 7 laporan.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan output 36 laporan
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan output 7 laporan

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran Rp 2.084.223.800,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 1.714.002.517,00 atau mencapai 82,24%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja jumlah BMD yang terpelihara dengan realisasi 100 % dari target 100 % sehingga capaiannya sebesar 100 %.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu kurangnya disiplinnya pengurus barang terhadap barang yang ada dibawah kekuasaannya seperti kendaraan dinas, upaya mengatasinya dengan melakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan dinas baik itu roda dua maupun roda empat.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan dengan output 1 Unit.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output 107 Unit
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan output 1 Unit
- d. Pemeliharaan Mebel dengan output 12 Unit
- e. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan output 70 unit
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output 11 Unit
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output 1 Unit

Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 9.407.750.500,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 9.287.644.912,00 atau mencapai 98,72%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja luas kawasan rawan banjir yang terlindungi dengan realisasi 101,86 km² dari target 101,86 km² sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu keterbatasan kewenangan pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan jaringan irigasi, Kabupaten masih mengendalikan sungai/waduk yang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk ketersediaan air baku. Upaya mengatasi hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu

- a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai dengan output 3 Dokumen.
 - b. Pembangunan Pintu air/ bendung pengendali banjir dengan output 2 Unit.
 - c. Pembangunan Stasiun Pompa Banjir dengan output 1 Unit
 - d. Rehabilitasi Tanggul Sungai dengan output 18,946 Km
 - e. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir dengan output 3 Unit
 - f. Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir dengan output 5 Unit
 - g. Normalisasi/Restorasi Sungai dengan output 15,705 Km
 - h. Operasi dan Pemeliharaan Check Dam dengan output 7 Unit
 - i. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output 113 Orang
 - j. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output 135 Orang
2. **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- Alokasi anggaran Rp 197.000.00000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 194.903.250,00 atau mencapai 98,94%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja luas

daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan realisasi 1562 Hektar dari target 1526 Hektar sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu keterbatasan kewenangan pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan jaringan irigasi, Kabupaten masih mengendalikan sungai/waduk yang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk ketersediaan air baku. Upaya mengatasi hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan output 1 dokumen.
- b. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan output 1,1 Km.

Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 20.862.308.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 19.465.658.008,00 atau mencapai 93,31%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja jumlah rumah tangga memperoleh layanan air minum dengan realisasi 2961 rumah tangga dari target 2460 rumah tangga sehingga capaiannya sebesar 120,37%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu topografi di wilayah Kabupaten Demak sebagian besar berupa pesisir pantai. Upaya untuk mengatasinya mencari

alternatif sumber air baku, mengajukan penganggaran baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk mendukung peningkatan akses air minum. Bersama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) melaksanakan pemetaan wilayah layanan, melaksanakan monitoring evaluasi terhadap sistem pengelolaan air minum yang telah terbangun.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan output 1 dokumen
- b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan output 179 Sambungan Rumah
- c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan output 1203 Sambungan Rumah

Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 19.164.471.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 18.534.484.659,00 atau mencapai 96,71 %. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja jumlah rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik dengan realisasi 1977 rumah tangga dari target 600 rumah tangga sehingga capaiannya sebesar 329,5%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan topografi di wilayah Kabupaten Demak Sebagian besar berupa pesisir pantai. Upaya untuk mengatasinya dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait dalam upaya peningkatan akses sanitasi dan pencapaian *Open Defecation Free* (ODF) Kabupaten Demak, mengarahkan fokus kegiatan pada peningkatan akses sanitasi dan pencapaian

Open Defecation Free (ODF) Kabupaten.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan output 1 dokumen
- b. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat dengan output 2523 Rumah Tangga
- c. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan output 30 kelompok
- d. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan output 1 unit

Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 1.000.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 688.832.092,00 atau mencapai 68,88%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja persentase drainase dalam kondisi baik dengan realisasi 90,12 % dari target 92,76 % sehingga capaiannya sebesar 97,15%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu faktor geografis Demak Kota berupa daratan dan cekungan sehingga faktor kemiringannya rendah, semakin bertambahnya drainase tertutup di wilayah Demak Kota yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan. Upaya mengatasinya dengan cara melebarkan

dimensi drainase agar dapat berfungsi sebagai penampung sementara sebelum mengalir ke sungai (*main drain*) serta meningkatkan pemeliharaan drainase khususnya pada drainase tertutup.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dengan output 675 meter
- b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dengan output 750 meter.

Kegiatan yang mendukung Program Penataan Bangunan Gedung memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Alokasi anggaran Rp 12.505.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 12.311.400.100,00 atau mencapai 98,45%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja rasio bangunan gedung dalam kondisi baik dengan realisasi 0,0219 dari target 0,0219 sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu belum tersedianya data bangunan gedung merupakan faktor penghambat pada indikator ini. Upaya mengatasinya dengan menjadwalkan pelaksanaan pekerjaan dan target yang harus dipenuhi, membuat database gedung Pemerintah Kabupaten Demak.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- a. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan output 20 Dokumen

- b. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan output 1 Unit.

Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Jasa Konstruksi memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Alokasi anggaran Rp 150.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 146.100.000,00 atau mencapai 97,40%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja pelatihan tenaga konstruksi dengan realisasi 1 dari target 2 sehingga capaiannya sebesar 50%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Masih minimnya staff/ tenaga ahli, data pendukung dan peralatan pada bina konstruksi guna menunjang program pengembangan jasa konstruksi. Upaya mengatasinya yaitu Menambahkan personel staff/tenaga ahli dan melengkapi peralatan pada bina konstruksi guna mengembangkan jasa konstruksi, membentuk tim koordinasi dengan pelaku badan usaha/penyedia jasa, membuat forum diskusi dengan badan usaha untuk koordinasi tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, membuat database tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi (badan usaha, tenaga terampil, tenaga ahli, alat konstruksi, dll)

Adapun kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan output 64 Orang

Kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Jalan memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 114.998.300.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 114.131.191.961,00 atau mencapai 99,25%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik dengan realisasi 826.986 m dari target 814.910 m sehingga capaiannya sebesar 106%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu beban kendaraan yang melewati kelas jalan melebihi kapasitas (tonase) sehingga mengakibatkan jalan cepat rusak, stabilitas tanah kurang stabil sehingga jalan bergelombang, adanya rob yang menyebabkan jalan berlubang. Upaya untuk mengatasi yaitu peningkatan penanganan jalan dan jembatan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan output 7 Dokumen.
- b. Pembangunan Jalan dengan output 31,19339 Km.
- c. Pelebaran Jalan Menuju Standar dengan output 0,256 Km.
- d. Rekonstruksi Jalan dengan output 3302,745 Km.
- e. Rehabilitasi Jalan dengan output 890,57 Km.
- f. Pembangunan Jembatan dengan output 115,1 m.
- g. Penggantian jembatan dengan output 41,905 m
- h. Rehabilitasi Jembatan dengan output 11,5 m

Kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan penataan Ruang memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 440.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 427.700.679,00 atau mencapai 97,20%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Dokumen RTR dengan realisasi 3 dari target 3 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu adanya keterbatasan alokasi anggaran maka dilakukan skala prioritas pembiayaan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang ada, terjadinya rob yang menyebabkan perubahan pola uang dan tanah musnah. Upaya mengatasinya dengan mengusulkan anggaran, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- a. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan output 2 Dokumen.
- b. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang penataan Ruang dengan output 4 dokumen

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 670.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 661.451.312,00 atau mencapai 98,72%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota dengan realisasi 1 dokumen dari target

1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu adanya keterbatasan alokasi anggaran maka dilakukan skala prioritas pembiayaan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang ada, terjadinya rob yang menyebabkan perubahan pola uang dan tanah musnah. Upaya mengatasinya dengan mengusulkan anggaran, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota dengan output 6 Dokumen.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 340.000.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 328.324.815,00 atau mencapai 96,57%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dengan realisasi 3 dari target 5 dokumen sehingga capaiannya sebesar 60%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu adanya keterbatasan alokasi anggaran maka dilakukan skala prioritas pembiayaan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang ada, terjadinya rob yang menyebabkan perubahan pola uang dan tanah musnah. Upaya mengatasinya dengan mengusulkan anggaran, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan output 5 Dokumen.

c. Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program. Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan “rata – rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata – rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikali 100”. Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana table berikut:

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari 9 program dan 19 kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian indikator program adalah 96,83% dan rata-rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan adalah 123,15%, sehingga tingkat kesesuaian kinerja program dan kegiatan adalah 78,63% termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian tinggi.

Adapun realisasi ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

**TABEL 3.1.2 PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR– URUSAN PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3	4	5	6,00	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100,00	Rp16.990.311.000,00	Rp16.075.418.150,00	94,62
			Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (%)	100	100	100,00	Rp7.183.997.400,00	Rp5.671.758.664,00	78,95
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100,00			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						123,92			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah (Dokumen)	16	32	200,00	Rp150.000.000,00	Rp111.648.250,00	74,43
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	1	25,00	Rp37.500.000,00	Rp29.702.250,00	79,21

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3	4	5	6,00	7	8	9
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	b. Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	8	400,00	Rp60.000.000,00	Rp47.948.000,00	79,91
	c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	c. Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	8	400,00	Rp15.000.000,00	Rp8.397.000,00	55,98
	d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	d. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	15	187,50	Rp37.500.000,00	Rp25.601.000,00	68,27
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan (Laporan)	1	1	100,00	Rp16.840.311.000,00	Rp15.963.769.900,00	94,79
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	179	145	81,01	Rp14.639.957.000,00	Rp14.220.777.124,00	97,14
	b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	b. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	71	1775,00	Rp2.200.354.000,00	Rp1.742.992.776,00	79,21

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3	4	5	6,00	7	8	9
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100,00	Rp623.900.000,00	Rp581.029.000,00	93,13
	a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	100,00	Rp87.500.000,00	Rp75.000.000,00	85,71
	b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	250	250	100,00	Rp536.400.000,00	Rp506.029.000,00	94,34
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100,00	Rp1.368.650.600,00	Rp807.328.500,00	58,99
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	200,00	Rp30.000.600,00	Rp14.201.000,00	47,34
	b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	b. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	9	450,00	Rp100.000.000,00	Rp69.323.900,00	69,32

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator		Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3		4	5	6,00	7	8	9
	c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	c.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	17	340,00	Rp150.000.000,00	Rp82.710.500,00	55,14
	d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	d.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	33	3300,00	Rp115.000.000,00	Rp66.791.150,00	58,08
	e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	e.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	12	1200,00	Rp11.500.000,00	Rp10.480.000,00	91,13
	f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	f.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	14	350,00	Rp776.150.000,00	Rp380.506.950,00	49,02
	g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	g.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	9	900,00	Rp36.000.000,00	Rp34.215.000,00	95,04
	h.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	h.	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	3	100,00	Rp150.000.000,00	Rp149.100.000,00	99,40

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3	4	5	6,00	7	8	9
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi (Dokumen)</i>	1	2	200,00	Rp75.000.000,00	Rp24.168.950,00	32,23
	a.	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	a. <i>jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (Dokumen)</i>	1	1	100,00	Rp35.000.000,00	Rp15.317.900,00	43,77
	b.	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	b. <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	1	1	100,00	Rp40.000.000,00	Rp8.851.050,00	22,13
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan (Unit)	91	38	41,76	Rp2.184.909.000,00	Rp2.083.980.000,00	95,38
	a.	<i>Pengadaan Alat Besar</i>	a. <i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>	1	1	100,00	Rp1.760.000.000,00	Rp1.760.000.000,00	100,00
	b.	<i>Pengadaan Mebel</i>	b. <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</i>	2	6	300,00	Rp23.757.600,00	Rp22.900.000,00	96,39
	c.	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	c. <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	57	31	54,39	Rp401.151.400,00	Rp301.080.000,00	75,05
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (%)	100	100	100,00	Rp847.314.000,00	Rp461.249.697,00	54,44

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3	4	5	6,00	7	8	9
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	388	7	1,80	Rp8.000.000,00	Rp4.800.000,00	60,00
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	100,00	Rp729.414.000,00	Rp416.914.697,00	57,16
	c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	7	116,67	Rp109.900.000,00	Rp39.535.000,00	35,97
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara (Unit)	119	178	149,58	Rp2.084.223.800,00	Rp1.714.002.517,00	82,24
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	100,00	Rp39.950.000,00	Rp23.521.442,00	58,88

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3	4	5	6,00	7	8	9
	b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	47	107	227,66	Rp690.515.400,00	Rp458.545.125,00	66,41
	c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	c. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	100,00	Rp100.000.000,00	Rp97.601.800,00	97,60
	d.	Pemeliharaan Mebel	d. Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	12	100,00	Rp55.000.000,00	Rp53.520.000,00	97,31
	e.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	e. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	70	140,00	Rp171.760.000,00	Rp66.652.750,00	38,81
	f.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	f. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	11	157,14	Rp828.758.400,00	Rp818.369.400,00	98,75
	g.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	g. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2258		0,00	Rp0,00		#DIV/0!
	h.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	h. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00	Rp198.240.000,00	Rp195.792.000,00	98,77

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	75,99	78,38	103,15	Rp9.604.750.500,00	Rp9.482.548.162,00	98,73
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					78,38			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					99,23			
1	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi (km²)</i>	112	110,91	99,03	Rp9.407.750.500,00	Rp9.287.644.912,00	98,72
a.	<i>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai</i>	<i>a. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)</i>	4	3	75,00	Rp200.000.000,00	Rp197.419.050,00	98,71
b.	<i>Pembangunan Pintu air/ bendung pengendali banjir</i>	<i>b. Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)</i>	2	2	100,00	Rp400.000.000,00	Rp398.282.000,00	99,57

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3	4	5	6,00	7	8	9
	c.	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	c. Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)	1	1	100,00	Rp500.000.000,00	Rp494.899.850,00	98,98
	d.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	d. Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (Km)	0,14	18,946	13532,86	Rp3.080.985.000,00	Rp3.042.322.401,00	98,75
	e.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	e. Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	3	3	100,00	Rp500.000.000,00	Rp494.964.600,00	98,99
	f.	Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	f. Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan (Unit)	3	5	166,67	Rp600.000.000,00	Rp597.152.000,00	99,53
	g.	Normalisasi/Restorasi Sungai	g. Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (Km)	1,4	15,705	1121,79	Rp3.589.740.500,00	Rp3.563.196.250,00	99,26
	h.	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	h. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	4	7	175,00	Rp160.275.000,00	Rp158.646.600,00	98,98
	i.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	i. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	113	161,43	Rp150.000.000,00	Rp127.653.700,00	85,10

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator		Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3		4	5	6,00	7	8	9
	j.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	j.	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	135	150,00	Rp226.750.000,00	Rp213.108.461,00	93,98
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi (Hektar)		1577	1568	99,43	Rp197.000.000,00	Rp194.903.250,00	98,94
	a.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	a.	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (Dokumen)	7	1	14,29	Rp100.000.000,00	Rp98.040.750,00	98,04
	b.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	b.	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	1,16	1,1	94,83	Rp97.000.000,00	Rp96.862.500,00	99,86
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase rumah tangga berakses air minum (%)		100	87,64	87,64	Rp20.862.308.000,00	Rp19.465.658.008,00	93,31
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							87,64			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator		Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3		4	5	6,00	7	8	9
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							120,37			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Rumah tangga memperoleh layanan air minum (Rumah Tangga)		2460	2961	120,37	Rp20.862.308.000,00	Rp19.465.658.008,00	93,31
	a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	a.	Pembangunan/Peningkatan/Pe rluasan/Optimalisasi SPAM (Dokumen)	3	1	33,33	Rp500.000.000,00	Rp328.551.630,00	65,71
	b.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	b.	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (Sambungan Rumah)	300	179	59,67	Rp4.293.725.000,00	Rp4.113.732.378,00	95,81
	c.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	c.	Jumlah sambungan rumah yang ditingkatkan (Sambungan Rumah)	1600	1203	75,19	Rp16.068.583.000,00	Rp15.023.374.000,00	93,50
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tangga bersanitasi (%)		100	100	100,00	Rp19.164.471.000,00	Rp18.534.484.659,00	96,71

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator		Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3		4	5	6,00	7	8	9
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah							100,00			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah							329,50			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik (Rumah Tangga)		600	1977	329,50	Rp19.164.471.000,00	Rp18.534.484.659,00	96,71
	a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	1	100,00	Rp500.000.000,00	Rp210.047.726,00	42,01
	b.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	b.	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik (Rumah Tangga)	600	2523	420,50	Rp18.064.471.000,00	Rp17.822.992.433,00	98,66
	c.	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	c.	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok)	20	30	150,00	Rp100.000.000,00	Rp68.350.000,00	68,35

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator		Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3		4	5	6,00	7	8	9
	d.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	d.	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	1	100,00	Rp500.000.000,00	Rp433.094.500,00	86,62
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun		Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	100,00	Rp1.000.000.000,00	Rp688.832.092,00	68,9
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							100,00			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							97,15			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase drainase dalam kondisi baik (%)		92,76	90,12	97,15	Rp1.000.000.000,00	Rp688.832.092,00	68,9
	a.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	a.	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi (m)	675	675	100,00	Rp400.000.000,00	Rp227.212.500,00	56,8
	b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	b.	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara (m)	750	750	100,00	Rp600.000.000,00	Rp461.619.592,00	76,9

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berizin	0,0219	0,0219	100,00	Rp12.505.000.000,00	Rp12.311.400.100,00	98,45
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Penataan Bangunan Gedung					100,00			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Penataan Bangunan Gedung					100,00			
1	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik</i>	0,0219	0,0219	100,00	Rp12.505.000.000,00	Rp12.311.400.100,00	98,45
	a. <i>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</i>	a. <i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	15	20	133,33	Rp12.305.000.000,00	Rp12.111.855.100,00	98,43

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator		Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3		4	5	6,00	7	8	9
	b.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	b.	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan (Unit)	1	1	100,00	Rp200.000.000,00	Rp199.545.000,00	99,77
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan		50,27	52,27	103,98	Rp150.000.000,00	Rp146.100.000,00	97,4
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengembangan Jasa Konstruksi							103,98			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi							50,00			
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Pelatihan tenaga konstruksi (Kali)		2	1	50,00	Rp150.000.000,00	Rp146.100.000,00	97,4
	a.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	a.	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	100	64	64,00	Rp150.000.000,00	Rp146.100.000,00	97,4

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator		Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3		4	5	6,00	7	8	9
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)		88,06	89,365	101,48	Rp102.863.717.272,00	Rp101.816.071.644,00	98,98
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Penyelenggaraan Jalan							101,48			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Jalan							101,48			
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (m)		814910	826990	101,48	Rp114.998.300.000,00	Rp114.131.191.961,00	99,25
	a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	a.	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dok)	3	7	233,33	Rp364.000.000,00	Rp360.478.900,00	99,03
	b.	Pembangunan Jalan	b.	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	12,02	31,19339	259,51	Rp59.144.640.000,00	Rp58.772.616.710,00	99,37

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator		Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3		4	5	6,00	7	8	9
	c.	Pelebaran Jalan Menuju Standar	c.	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar (Km)	0,76	0,256	33,68	Rp250.000.000,00	Rp244.795.000,00	97,92
	d.	Rekonstruksi Jalan	d.	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (Km)	5,75	3302,745	57439,04	Rp34.500.000.000,00	Rp34.242.027.299,00	99,25
	e.	Rehabilitasi Jalan	e.	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)	2,3	890,57	38720,43	Rp3.136.000.000,00	Rp3.076.432.502,00	98,10
	f.	Pembangunan Jembatan	f.	Panjang Jembatan yang Dibangun (m)	156	115,1	73,78	Rp13.686.830.000,00	Rp13.634.643.150,00	99,62
	g.	Penggantian Jembatan	g.	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian (m)	42	41,905	99,77	Rp3.036.830.000,00	Rp3.030.987.450,00	
	h.	Rehabilitasi Jembatan	h.	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (m)	48	11,5	23,96	Rp880.000.000,00	Rp769.210.950,00	88,84
IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Luas alih fungsi lahan		0,059577	0,059577	100,00	Rp1.450.000.000,00	Rp1.417.476.806,00	98,58
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							100,00			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							86,67			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3	4	5	6,00	7	8	9
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Dokumen RTR (Dokumen)	3	3	100,00	Rp440.000.000,00	Rp427.700.679,00	97,20
	a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	a. Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	2	66,67	Rp340.000.000,00	Rp333.625.679,00	98,13
	b.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang penataan Ruang	b. Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	100,00	Rp100.000.000,00	Rp94.075.000,00	94,08
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen RTR (Dokumen)	1	1	100,00	Rp670.000.000,00	Rp661.451.312,00	98,72
	a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota	a. Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	6	600,00	Rp670.000.000,00	Rp661.451.312,00	98,72

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3	4	5	6,00	7	8	9
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen RTR (Dokumen)	5	3	60,00	Rp340.000.000,00	Rp328.324.815,00	96,57
	a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	a. Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	5	100,00	Rp340.000.000,00	Rp328.324.815,00	96,57

3.2 Urusan Pertanahan

Permasalahan pada urusan pertanahan adalah Masih banyaknya aset tanah milik pemerintah Kabupaten Demak yang belum bersertifikat

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu : Program Penatagunaan Tanah

1. Program Penatagunaan Tanah

Alokasi anggaran Rp 283.290.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 273.345.500,00 atau mencapai 96,49 %. Program ini memiliki indikator kinerja persentase tanah Pemerintah Kabupaten bersertifikat dengan target 86,67 % terealisasi 94,74% atau mencapai 109,31%. Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (109,31%) disebabkan adanya regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan, ketersediaan anggaran, adanya sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan instansi lain dan *stakeholder* serta karena adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola ruang dan manfaatnya untuk menjaga ketertiban dan kelancaran secara prasarana.

Namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan penambahan personil juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan mengirim personil untuk mengikuti diklat maupun pelatihan tentang peraturan perundang-undangan reforma agraria. Manfaat Penyelenggaraan Program Penatagunaan Tanah adalah tertib administrasi dan memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Kegiatan yang mendukung Program Penatagunaan Tanah memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 283.290.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 273.345.500,00 atau mencapai 96,49%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja tanah Pemerintah Kabupaten bersertifikat dengan realisasi 101 bidang dari target 100 bidang sehingga capaiannya sebesar 101%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya tanah yang hilang karena rob. Upaya Untuk mengatasinya dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak

Adapun kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah KabupateSn/Kota dengan output 101 bidang.

c. Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan

Urusan Pertanahan dilaksanakan melalui 1 (satu) program. Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan “rata – rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata – rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikali 100”. Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan sebagaimana table berikut:

Tabel 3.2.1

Analisis Tingkat Kesesuaian Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan
Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Demak

No	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7 [[4 : 6)*100]	8
1	Program Penatagunaan Tanah	1	99,73	1	101,00	98,74	Sangat Tinggi

Sumber Data: DINPUTARU Kabupaten Demak, 2023

Keterangan:

Kategori Tingkat Kesesuaian adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 – 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99\%$

Kinerja Program Penatagunaan Tanah dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 99,73%. Kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 101%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 98,74% dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sangat tinggi**.

Adapun realisasi ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 3.2.2 PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR– URUSAN PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator		Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3		4	5	6,00	7	8	9
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Penatagunaan Tanah							99,73			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Penatagunaan Tanah							101,00			
1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Tanah pemkab bersertifikat (Bidang)		100	101	101,00	Rp283.290.000,00	Rp273.345.500,00	96,49
	a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	101	101,00	Rp283.290.000,00	Rp273.345.500,00	96,49

Tabel 3.2.2 Kategori Kesesuaian

Kategori Tingkat Kesesuaian		
1	Sangat Tinggi	>91%
2	Tinggi	76 – 90,99%
3	Sedang	66 – 75,99%
4	Rendah	51 – 65,99%
5	Sangat Rendah	≤59,99%

3.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Tabel 3.3.1 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategisi	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Peningkatan kualitas layanan internal pemerintahan		
2	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi		
3	Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan		
4	Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah		
5	Integrasi e-government		
6	Peningkatan kualitas kinerja SDM aparatur dari sisi kompetensi teknis dan jabatan		
7	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan		
8	Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan		
9	Peningkatan pengawasan kesesuaian pembangunan dengan RTRW daerah		
10	Percepatan pembangunan infrastruktur perluasan perkotaan dan kawasan pesisir		

3.4 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
-	-	-	-

Tahun 2023 tidak terdapat rekomendasi, tindak lanjut dan penyelesaian masalah program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak tidak terdapat urusan pemerintahan yang ditugaspembantuan

4.2 Hambatan Permasalahan dalam Pelaksanaan TP/Penugasan dan Upaya Penyelesaian

Karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak tidak terdapat urusan pemerintahan yang ditugas pembentukan sehingga tidak terdapat hambatan permasalahan dalam pelaksanaan TP/Penugasan dan Upaya Penyelesaian.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsi. LKPj merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan realisasi dari seluruh pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak berdasarkan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu satu tahun anggaran. Tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih dijumpai banyak kendala atau hambatan, sehingga dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Satu hal yang harus lebih ditekankan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang adalah adanya peningkatan koordinasi internal dan lintas sektoral sehingga dapat tercapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pembangunan, jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak termasuk jajaran pemerintahan desa / kelurahan dan masyarakat Kabupaten Demak secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Demak. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam program / kegiatan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup hal –hal yang substantif maupun redaksional . Kritik dan saran sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak pada tahun mendatang.

Demikian laporan pelaksanaan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

Demak, Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK
Sekretaris

RUDATIN SURYANDARI, ST, M.SI

Pembina Tingkat I
NIP. 19660427 199903 2 002